

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kajian tentang pembangunan desa di Indonesia tidak pernah bisa dipisahkan dari pembahasan tentang pertanian, karena sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, oleh karena itu pembangunan pertanian sering kali dikaitkan dengan pembangunan pedesaan. Untuk daerah Provinsi Sumatera Barat dari sembilan sektor ekonomi penyumbang PDRB, maka pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata 24,75 persen pertahun, dengan rincian PDRB sektor pertanian sebesar rata-rata 24 persen itu berasal dari kontribusi lima subsektor yakni, tanaman pangan sebesar 12,79 persen, perkebunan (5,48), peternakan (2,02), kehutanan (1,52) dan subsektor perikanan dengan kontribusi 2,94 persen. (Master Sihotang, 2011). Disamping itu usaha pertanian masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang mencapai 47,25 persen (Situs Resmi Pemerintah Sumatera Barat, 2008).

Suatu hal yang ironis adalah petani sebagai pelaku utama sektor pertanian sebagian besar berpendapatan rendah dan hidup dalam kemiskinan. *Problem* mendasar bagi mayoritas petani Indonesia adalah ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah, hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani. Menurut Branson dan Douglas (1983), lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai.

Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan keuntungan layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani yang bergerak di sub sistem *on farm* dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir. Kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi mereka. Oleh karena itu penyuluhan pertanian

harus lebih tertuju pada upaya membangun kelembagaan. Lembaga ini hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan dan pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga petani harus menjadi subjek dalam proses tersebut (Jamal, 2008).

Jika kita ingin mengembangkan agribisnis maka strategi utama haruslah dengan meningkatkan posisi tawar petani sebagai produsen, disamping itu penguatan lembaga dan infrastruktur pemasaran merupakan *instrument* yang penting agar dapat mengembangkan agribisnis itu sendiri. Dalam perjalanannya kelembagaan dan organisasi petani di Indonesia dirasa tidak maksimal dalam meningkatkan posisi tawar petani sebagai produsen. Dimana dalam pengelolaannya kelembagaan dan organisasi formal petani, sering ditemukan kekurangan dalam hal manajemen organisasi tersebut, seperti organisasi dan kelembagaannya hanya dikelola oleh segelintir pengurus saja. Fungsi dari masing-masing bidang dari struktur keorganisasian tidak berjalan optimal, hampir selalu ditemukan yang bekerja dan menjalankan kelembagaan dan organisasi petani hanya ketua organisasinya saja. Maka tak jarang bila seorang ketua organisasi sedang tidak aktif, diganti atau tidak memiliki kompetensi yang sesuai maka kelembagaan tersebut juga memberikan kinerja yang menurun pula.

Disisi lain sikap pemerintah selama ini yang menjadikan organisasi formal sebagai satu-satunya jalan untuk menggerakkan dalam pemberdayaan, merupakan pendapat yang sudah waktunya direvisi. Selain bahwa anjuran ini kurang disukai petani, pemaksaan ini berdampak kepada banyak masalah di lapangan, misalnya berlangsungnya kebohongan administratif, program yang tidak efektif mencapai petani yang semestinya, dan membuat manfaat pembangunan kurang terdistribusi secara adil. Pemberian bantuan kepada masyarakat yang menurut aturan hanya dapat diberikan kepada organisasi formal semestinya ditiadakan, karena tidak akan mampu mencapai petani-petani kecil dan miskin yang sesungguhnya jauh lebih membutuhkan (Syahyuti, 2012).

Sesuai dengan pendekatan Teori Kelembagaan Baru, organisasi petani dalam bentuk formal semata-mata mestilah hanya dipandang sebagai pilihan. Untuk berjalannya pembangunan pertanian, atau aktivitas agribisnis khususnya, yang dibutuhkan adalah pengorganisasian petani (dalam makna luas) mudah di

akses dan efektif. Setiap transaksi dapat dijalankan dengan biaya murah, dan tersedia jaringan antar pelaku dengan bentuk terpola sehingga dapat menjadi wadah yang dapat diakses petani dengan mudah. Pengorganisasian petani pada hakekatnya merupakan upaya untuk menjalankan tindakan kolektif, dengan keyakinan bahwa tindakan kolektif lebih murah dan efektif. Pengorganisasian seperti ini diharapkan akan dapat meupayakan agar *profit center* berada pada petani.

Konsep pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui koperasi bukanlah konsep baru, banyak kendala dan hambatan yang harus diperhatikan dalam pengembangan koperasi di pedesaan, diantaranya adalah: (a) rendahnya minat masyarakat untuk bergabung dalam kelompok tani/koperasi, hal ini disebabkan karena kegagalan-kegagalan dan stigma negatif tentang kelembagaan tani/koperasi yang terbentuk di dalam masyarakat. Kegagalan yang dimaksud diantaranya adalah ketidakmampuan kelembagaan tani/koperasi dalam memberikan kebutuhan anggotanya dan ketidakmampuan dalam memasarkan hasil produk pertanian anggotanya. (b) adanya ketergantungan petani kepada tengkulak akibat ikatan yang ditimbulkan karena petani melakukan transaksi dengan para tengkulak (pinjaman modal, dan memasarkan hasil) dan (c) rendahnya SDM petani di pedesaan menimbulkan pemahaman dan arti penting koperasi terabaikan.

Sub terminal Agribisnis (STA) merupakan perwujudan atas fenomena yang selama ini berkembang dalam tatanan pemasaran komoditas pertanian dan sekaligus sebagai bagian dari rangkaian agribisnis, dimana selama ini pemasaran di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa: kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan sosial, pengakuan, dan pengembangan pengakuan. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai komoditas pertanian pada umumnya mempunyai mata rantai yang panjang, mulai dari petani produsen, pedagang pengumpul, pedagang besar hingga mengakibatkan kecilnya keuntungan yang diperoleh oleh petani serta konsumen membayar lebih mahal

dari harga yang selayaknya ditawarkan sehingga biaya pemasaran (*marketing cost*) dari produsen ke konsumen menjadi cukup tinggi (Setiajie, 2004).

Subterminal Agribisnis merupakan infrastruktur pemasaran sebagai tempat transaksi jual beli hasil-hasil pertanian baik transaksi fisik maupun non fisik yang terletak di sentra produksi. Dengan demikian, penekanannya adalah bahwa STA merupakan sarana pemasaran yang dilakukan oleh produsen (Tanjung, 2001).

Sasaran utama pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA) pada dasarnya adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani dan pelaku pasar, disamping untuk mendidik petani untuk memperbaiki kualitas produknya sekaligus mengubah pola pikir ke arah agribisnis serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah disamping untuk mengembangkan akses pasar (Badan Agribisnis Departemen Pertanian, 2000, Sukamadinata, 2001).

Berbagai kajian menunjukkan peran STA belum optimal memperbaiki pendapatan petani (Musanif, 2004; Cemsed, 2008; Sayaka, dkk, 2008). Bahkan di provinsi Jawa Tengah, dari tujuh STA yang ada (Sewukan, Ngablak, Karangpandan, Jetis, Kutabawa, Jalabatingkas, Krendetan), STA Karang Pandan berada dalam kondisi “mangkrak” dan mulai tahun 2012 akan dialihfungsikan untuk pusat oleh-oleh. Nampaknya, dorongan dari konsep otonomisasi dan desentralisasi pembangunan serta adanya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan STA cenderung lebih mengemuka, terutama dalam mendorong pembangunan sarana dan prasarana fisik STA terlebih dahulu dibandingkan dengan pembentukan sistem dan kinerja dari permasalahan-permasalahan pemasaran yang akan ditangani lebih lanjut melalui STA tersebut.

Hal ini diduga disebabkan pendirian dan pengelolaan STA lebih didominasi oleh pihak pihak yang bukan petani, sebab menurut Sukmadinata (2001) pengelolaan STA dapat dilakukan oleh koperasi pelaku agribisnis, dalam hal ini petani, nelayan, pengolah, dan pedagang, gabungan dari koperasi pelaku agribisnis dengan pemerintah daerah atau bahkan bisa dilakukan hanya oleh pemerintah daerah. Pengelolaan juga dapat dilakukan oleh pengusaha swasta, baik nasional maupun asing, atau bahkan gabungan dari swasta asing dan nasional dengan koperasi. Begitu pula dengan BUMD serta gabungan dari pelaku pasar agribisnis lainnya. Dengan demikian, pengelolaan STA dapat ditentukan sesuai

dengan kepentingan serta kesepakatan dari para pelaku agribisnis. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya terdapat berbagai bentuk dan corak STA sehingga tujuan utama untuk meningkatkan posisi tawar petani dan pengembangan agribisnis belum tentu dapat terwujud.

Akan tetapi terlepas dari siapa yang mengelola STA haruslah memiliki jiwa *entrepreneur*, disuatu pihak kebanyakan petani di Indonesia berpendidikan rendah dan tidak memiliki kemampuan *entrepreneur* sehingga keinginan meningkatkan *bargaining position* petani oleh petani sendiri dalam sistem agribisnis menjadi suatu konsep yang tidak aplikatif. Kalaupun tidak dikelola oleh petani, penulis berpendapat bisa saja *manager* pengelola STA di upahkan kepada seorang yang berkemampuan manajerial dan berjiwa *entrepreneur*. Salah satu tujuannya didirikannya STA adalah untuk mengangkat posisi tawar petani terutama dari segi harga di tingkat petani dan mengubah struktur pasar yang lebih menguntungkan semua pihak baik petani maupun pedagang dan juga konsumen.

Tanpa memikirkan petani sebagai pelaku utama yang memproduksi hasil pertanian tersebut sukar diharapkan agribisnis disuatu daerah akan berkembang. Disisi lain jika bertani didesa tidak lagi memberikan hasil yang mencukupi kebutuhan seorang petani, mereka cenderung bermigrasi ke kota dan berpindah ke sektor lain seperti pedagang kaki lima, kuli bangunan, dan sebagainya. Salah satu yang dapat meningkatkan gairah petani untuk berproduksi adalah keterjaminan pemasaran hasil produksi mereka. STA adalah salah satu lembaga pemasaran yang diharapkan dapat menjamin pemasaran hasil produksi petani dan juga meningkatkan posisi tawar petani.

Peningkatan posisi tawar petani yang menggunakan jasa STA akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang mendirikan dan mengelola STA, karena sebagaimana diketahui bahwa STA dapat saja didirikan dan dikelola oleh pihak yang bukan petani. Sehingga tujuan utamanya belum tentu meningkatkan posisi tawar petani. STA Baliak Mayang adalah salah satu STA yang didirikan oleh kelompok tani. Oleh sebab itu diduga aturan-aturan permainan serta visi dan misi dari STA ini akan berpihak kepada peningkatan posisi tawar petani. Boleh dikatakan bahwa STA Baliak Mayang adalah dari petani untuk petani karena pengurusnya terdiri

dari petani yang sekaligus berkepentingan terhadap peningkatan posisi tawar hasil produksi mereka.

## **B. Masalah Penelitian**

Petani sebagai pelaku utama sektor agribisnis sebahagian besar berpendapatan rendah dan hidup dalam kemiskinan. Problem mendasar bagi mayoritas petani adalah ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini pada umumnya lemah, hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani.

STA adalah salah satu jawaban untuk meningkatkan posisi tawar petani. Walaupun demikian keberhasilan STA ini juga akan sangat dipengaruhi oleh sumberdaya dan sistem pengelolaannya. Oleh sebab itu tidak semua STA berhasil meningkatkan posisi tawar petani dan menunjang pengembangan agribisnis disuatu daerah. Mengeluarkan petani dari lingkaran kemiskinan sebagai tujuan utama didirikannya STA.

Pada Lomba Kelompok Tani Tingkat Sumbar 2011 Kelompok Tani Baliak Mayang terpilih sebagai juara. Hal ini diumumkan Dinas Pertanian Sumbar pada peringatan HUT ke 66 RI di halaman kantor Gubernur Sumbar di Padang, Rabu (17/8/2011) lalu. STA ini bergerak dibidang pertanian tanaman holtikultura. Hasil panen Baliak Mayang berupa terung, sayur-sayuran, kacang-kacangan, mentimun dan sayuran lainnya, telah mampu mensuply daerah pekanbaru 5 ton/minggu, disamping memasok pasar dalam daerah payakumbuh sendiri (Padang Expres, 2011).

Studi ini akan mencoba mencari tahu apakah STA telah berhasil dalam meningkatkan posisi tawar petani dan telah dapat menunjang pengembangan Agribisnis di pedesaan Sumatera Barat. Masalah ini akan diteliti di STA Balik Mayang Kelurahan Padang Alai Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Sumatera Barat.

Pertanyaan penelitian:

1. Bagaimanakah peran dan fungsi kelembagaan STA Baliak Mayang, dalam pengembangan agribisnis di wilayah kerjanya.

2. Apakah STA Balik Mayang yang dikelola oleh kelompok Tani telah berhasil dalam meningkatkan posisi tawar petani.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan kelembagaan STA Baliak Mayang serta meneliti peran dan fungsinya dalam menunjang pengembangan sistem agribisnis di Sumatera Barat antara lain penyediaan bibit, pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian pada subsistem hulu, pada subsistem usaha tani STA yaitu penyuluhan dan pendidikan petani dalam peningkatan dan efisiensi produksi. Pada subsistem hilir pingsinkronkan permintaan pasar dengan manajemen lahan, pola tanam, permodalan, dan peningkatan SDM pemasaran.
2. Melihat peran dan fungsi STA dalam meningkatkan posisi tawar petani.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dilihat peran STA dalam meningkatkan posisi tawar petani dan pengembangan agribisnis di Sumatera Barat.



